



LAPORAN SINGKAT
KOMISI VI DPR RI: BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM,
BUMN, DAN INVESTASI

Tahun Sidang	:	2018-2019
Masa Persidangan	:	V
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan: 1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM); 2. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam); dan 3. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS).
Sifat Rapat	:	Terbuka
Rapat ke	:	10 (sepuluh)
Hari/Tanggal	:	Rabu, 19 Juni 2019
W a k t u	:	Pukul 10.35 s.d 12.45 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI
Ketua Rapat	:	Ir. H. Azam Azman Natawijana (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/FPD), didampingi oleh: 1. Ir. H. Teguh Juwarno, M.Si. (Ketua Komisi VI DPR RI/FPAN) 2. H. Dito Ganinduto, M.B.A. (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/FPG).
Sekretaris Rapat	:	Dewi Resmini, S.E., M.Si (Kabag Set. Komisi VI DPR RI)
A c a r a	:	Membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) BKPM, BP Batam, dan BPKS Tahun Anggaran 2020.
Hadir	:	1. dari 50 Anggota Komisi VI DPR RI; 2. Kepala BPKM beserta jajaran; 3. Kepala BP Batam beserta jajaran; 4. Kepala BPKS beserta jajaran;

I. PENDAHULUAN

1. RDP Komisi VI DPR RI dengan Kepala BKPM, Kepala BP Batam, dan Kepala BPKS dibuka pukul 10.35 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menginformasikan bahwa agenda RDP pada hari ini adalah dalam rangka membahas mengenai RKA dan RKP BKPM, BP Batam, dan BPKS Tahun Anggaran 2020.
3. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Kepala BKPM, Kepala BP Batam, dan Kepala BPKS untuk menjelaskan RKA dan RKP BKPM, BP Batam, dan BPKS Tahun Anggaran 2020.
4. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Anggota Komisi VI DPR RI untuk mengajukan pertanyaan/tanggapan atas penjelasan Kepala BKPM, Kepala BP Batam, dan Kepala BPKS.

II. KESIMPULAN

A. BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM)

1. Komisi VI DPR RI menerima **pagu indikatif** anggaran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun Anggaran 2020, berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan Nomor S-338/MK.02/2019 dan Kepala Bappenas Nomor B-241/M.PPN/D.8/KU.01.01/04/2019 tanggal 29 April 2019 sebesar **Rp585.471.934.000,00** (Lima Ratus Delapan Puluh Lima Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah) dengan rincian per program sebagai berikut:
 - a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKPM sebesar Rp298.059.101.805,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Miliar Lima Puluh Sembilan Juta Seratus Satu Ribu Delapan Ratus Lima Rupiah); dan
 - b. Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal sebesar Rp287.412.832.195,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Dua Belas Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Seratus Sembilan Puluh Lima Rupiah).Selanjutnya, Komisi VI DPR RI akan menyampaikan hasil pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BKPM Tahun 2020 kepada Badan Anggaran DPR RI untuk disinkronisasi.
2. Komisi VI DPR RI menerima **usulan tambahan anggaran** BKPM Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp202.941.657.550,00** (Dua Ratus Dua Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah) yang termasuk dalam program prioritas BKPM Tahun 2020 tetapi belum terakomodir dalam pagu indikatif BKPM tahun 2020. Selanjutnya, Komisi VI DPR RI akan menyampaikan usulan tambahan Anggaran BKPM Tahun 2020 kepada Badan Anggaran DPR RI untuk disinkronisasi.
3. Komisi VI DPR RI mengapresiasi realisasi anggaran BKPM Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp480.686.624.859,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) atau mencapai 87,68% dari total pagu alokasi anggaran sebesar Rp548.229.840.000,00 (Lima Ratus Empat Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

B. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (BP BATAM)

1. Komisi VI DPR RI menerima **pagu indikatif** anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) Tahun Anggaran 2020, berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan Nomor S-338/MK.02/2019 dan Kepala Bappenas Nomor B-241/M.PPN/D.8/KU.01.01/04/2019 tanggal 29 April 2019 sebesar **Rp2.226.885.004.000,00** (Dua Triliun Dua Ratus Dua Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Empat Ribu Rupiah) dengan rincian per program sebagai berikut:
 - a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BP Batam sebesar Rp919.120.661.000,00 (Sembilan Ratus Sembilan Belas Miliar Seratus Dua Puluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) dengan sumber pendanaan PNB BP Batam; dan

- b. Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebesar Rp1.307.764.343.000,00 (Satu Triliun Tiga Ratus Tujuh Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) dengan sumber pendanaan:
 - 1) Rupiah Murni (RM) sebesar Rp527.000.000.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Miliar Rupiah),
 - 2) PNBPN sebesar Rp556.594.343.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Enam Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah),
 - 3) Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesar Rp188.880.000.000,00 (Seratus Delapan Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah), dan
 - 4) Rupiah Murni Pendamping (RMP-PLN) sebesar Rp35.290.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah).

Selanjutnya, Komisi VI DPR RI akan menyampaikan hasil pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BP Batam Tahun 2020 kepada Badan Anggaran DPR RI untuk disinkronisasi.

2. Komisi VI DPR RI memahami realisasi anggaran BP Batam Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.368.858.100.071,00 (Satu Triliun Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Seratus Ribu Tujuh Puluh Satu Rupiah) atau 73,81% dari total pagu alokasi anggaran sebesar Rp1.854.623.583.000,00 (Satu Triliun Delapan Ratus Lima Puluh Empat Miliar Enam Ratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah).

C. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS)

1. Komisi VI DPR RI menerima **pagu indikatif** anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) Tahun Anggaran 2020, berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan Nomor S-338/MK.02/2019 dan Kepala Bappenas Nomor B-241/M.PPN/D.8/KU.01.01/04/2019 tanggal 29 April 2019 sebesar **Rp144.558.489.000,00** (Seratus Empat Puluh Empat Miliar Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan rincian per program sebagai berikut:
 - a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKS sebesar Rp40.719.605.000,00 (Empat Puluh Miliar Tujuh Ratus Sembilan Belas Juta Enam Ratus Lima Ribu Rupiah) dengan sumber pendanaan Rupiah Murni; dan
 - b. Program Perencanaan, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kawasan Sabang sebesar Rp103.838.884.000,00 (Seratus Tiga Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah) dengan sumber pendanaan:
 - 1) Rupiah Murni sebesar 99.748.884.000,00 (Sembilan Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah), dan
 - 2) Badan Layanan Umum sebesar Rp4.090.000.000,00 (Empat Miliar Sembilan Puluh Juta Rupiah).

Selanjutnya, Komisi VI DPR RI akan menyampaikan hasil pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPKS Tahun 2020 kepada Badan Anggaran DPR RI untuk disinkronisasi.

2. Komisi VI DPR RI menerima **usulan tambahan anggaran** BPKS Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp36.800.000.000,00** (Tiga Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah). Selanjutnya, Komisi VI DPR RI akan menyampaikan usulan tambahan anggaran BPKS Tahun 2020 kepada Badan Anggaran DPR RI untuk disinkronisasi.
3. Komisi VI DPR RI memerlukan penjelasan lebih lanjut terkait realisasi anggaran BPKS Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp152.957.668.389,00 (Seratus Lima Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah) atau 68,02% dari total pagu alokasi anggaran sebesar Rp224.864.020.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Empat Juta Dua Puluh Ribu Rupiah).

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 12.45 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,**

TTD.

Ir. H. AZAM AZMAN NATAWIJANA
A-430